

---

## PENGUATAN KOMUNIKASI KAUM PARIAH PADA RUANG PUBLIK DI KAMPUNG KOTA

Melati Mediana Tobing<sup>1</sup>, Gedra Wansa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Kristen Indonesia.

Email : [melati.tobing@uki.ac.id](mailto:melati.tobing@uki.ac.id)<sup>1</sup>, [gedrawansa12@gmail.com](mailto:gedrawansa12@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The urban village grew as a residence for pariahs in various parts of Indonesia. Urbanization which attracts rural people to become new residents of the city, has made them a marginal group. Although they have a role in the business and economic processes of the city, these pariahs are hardly taken into account in the process of urban development. Until, when the city became increasingly crowded, the dwelling of the pariahs was considered a scourge for the new face of the city. The pariahs were also relocated to a space appropriate to the parvenue culture. Cultural conflicts in public spaces occur due to differences in habits and perceptions of the new space. Social interaction is hindered while face-to-face communication cannot be replaced by new media, thus weakening the pariahs and causing disharmony in urban society.*

*Keywords: Kampung Kota, Collectivistic, Communication, Pariah, Public Space.*

---

### I. Pendahuluan

Kampung kota merupakan bagian dari pemukiman kota, sehingga hal tersebut tidak terpisahkan dalam tatanan sistem kota di Indonesia. Kampung kota juga bisa diartikan sebagai “kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi kurang baik” (Budiharjo 1992) atau “kawasan hunian kaum kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali” (Tunner 1985). Sebagai suatu tatanan sistem kota maka kampung kota menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi kaum termarjinalkan, yang disebut di sini sebagai kaum pariah. Pertumbuhan kota semakin jelas mendorong permasalahan perkotaan baik itu kriminalitas atau bencana alam

seperti banjir tahunan di kota Jakarta. Tragisnya permasalahan yang muncul di kota Jakarta selalu dikaitkan dengan kaum termajinalkan yang menepati ruang-ruang pada hunian kumuh, termasuk warga yang tinggal di wilayah sekitar bantaran Kali Ciliwung (Heryati 2011).

Beberapa media dengan terang-terangan membungkus permasalahan perkotaan tersebut dengan mengaitkan kaum termajinalkan ini sebagai sumber permasalahan tersebut. Sejalan dengan itu pemerintah kota sadar akan permasalahan yang telah muncul di masyarakat sehingga mereka merancang program revitalisasi, yang disebut dengan proyek normalisasi kali Ciliwung. Namun demikian terdapat implikasi berupa relokasi pemukiman kampung kota untuk menempatkan kaum kaum termajinalkan tersebut ke hunian yang lebih layak. Keberadaan proyek normalisasi tersebut tentunya sangatlah menguntungkan pemerintah yang sejak tahun 2014 sudah

merencanakan program tersebut, namun terkendala disebabkan masyarakat di lokasi tersebut yang sudah beranak cucu sehingga sulit untuk dipindahkan.

Permasalahan banjir besar kota Jakarta merupakan kesempatan pemerintah untuk menjadikan momen ini sebagai langkah yang tepat dalam melancarkan programnya. Akan tetapi, hal ini menjadi simalakama bagi pemerintah kota. Mereka sesungguhnya menyadari bahwa menghadapi musuh dari suatu bangsa lain sangatlah mudah tetapi berbeda jika menghadapi kaumnya sendiri, yang tentunya membutuhkan strategi khusus dalam menghadapinya.

Tulisan ini memberikan gambaran terhadap karakteristik masyarakat kampung kota, yang dalam hal ini diwakili oleh warga Kampung Pulo, yang kehilangan ruang-ruang publik mereka ketika menempati ruang yang baru di Rumah Susun Jatinegara Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif komunikasi antarbudaya terhadap ruang pada proses relokasi masyarakat marjinal perkotaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi para perencana kota dalam melakukan proses relokasi pada hunian dengan memperhatikan ketersediaan ruang-ruang publik mereka. Tulisan ini juga merupakan bentuk pengembangan dari salah satu hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Kontradiksi Prosekmik Pada Masyarakat Kolektivistik Kampung Kota (Tinjauan Komunikasi Antarbudaya Terhadap Perubahan Konteks Ruang di Rumah Susun oleh Warga Relokasi Bantaran Ciliwung Kampung Pulo)". Penelitian dilakukan terhadap masyarakat Kampung Pulo yang mengalami proses relokasi (Tobing, Sunarwinadi, and Triastuti n.d.) dan hingga saat ini tinggal di rumah susun sewa Jatinegara Barat.

Tulisan ini melihat pentingnya tersedia ruang-ruang publik agar terciptanya kekuatan komunikasi pada masyarakat

yang tinggal di rumah susun sewa Jatinegara Barat. Berdasarkan latarbelakang permasalahan terhadap perlunya kesadaran untuk melakukan penguatan komunikasi kaum pariah pada ruang publik kampung kota di rumah susun sewa Jatinegara Jakarta Timur tersebut, maka penulis kemudian menurunkannya dalam pertanyaan penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk penguatan komunikasi yang dapat diterapkan pada kaum pariah agar dapat membentuk kembali ruang publik kampung kota?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberi gambaran tentang bagaimana bentuk penguatan komunikasi yang dapat diterapkan pada kaum pariah agar terbentuk kembali ruang publik kampung kota.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pengembangan keilmuan keilmiah lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah dalam bidang pendidikan khususnya di bidang sosiologi dan komunikasi. Sedangkan secara praktis, peneliti diharapkan memberikan informasi bagi akademisi maupun pembuat kebijakan terkait penataan ruang kota, agar dapat memberikan kesempatan bagi kaum pariah berinteraksi dalam ruang publik mereka.

Masyarakat kampung kota pada umumnya merupakan masyarakat dengan karakteristik budaya kolektivistik. Mereka secara intensif berkomunikasi pada ruang-ruang sosialnya di mana saja dan kapan saja mereka bisa bertemu setiap harinya. Interaksi tanpa batasan ruang dan waktu ini kemudian membentuk ruang publik warga kampung kota, sebagai tempat bagi warga untuk berdialog dan berinteraksi sekaligus melakukan berbagai ragam aktivitas sosial mereka didalamnya.

Karakteristik budaya kolektivistik kampung kota sering kali terdapat lebih dari satu budaya, dimana istilah budaya dan masyarakat ini dalam berbagai bahasa seringkali digunakan secara sinonim meski merujuk pada hal yang berbeda. Penjelasan tentang budaya ini dapat dilakukan melalui telaah pada perwujudan (manifestasi) budaya, di mana masyarakat terus menerus menjadi manifestasi baik secara geografis maupun sejarah dari budayanya (Danesi, M & Perron 1999).

Habermas (1994) mengatakan bahwa ruang publik adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan sipil, ruang ini adalah universal, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didiskusikan. Ruang publik menjadi urat nadi dalam dunia politik demokrasi (Tobing 2017). Konsep ruang publik yang telah disebutkan oleh Habermas ditambah dengan adanya ruang privat sebagai suatu hak kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia terlihat kurang dihargai oleh pemerintah. Contohnya adalah relokasi pemukiman yang menyebabkan hilangnya ruang publik yang selama ini telah terbentuk di masyarakat.

Studi proksemik dalam disiplin ilmu komunikasi mengungkapkan adanya dimensi tersembunyi dari pesan yang disampaikan oleh ruang, sehingga mencakup studi pada komunikasi non-verbal dan komunikasi antarbudaya (Tobing 2021). Istilah "Prosekmik" pertama kali ditemukan dalam studi antropologi (Hall 1964) yang mencari yang mencari manifestasi teritorial manusia pada ruang, setelah melihat interaksi hewan unggas yang dikembangkan studi etologi. Mengacu pada istilah yang digunakan Hall tersebut maka prosekmik dalam kasus ini dapat diartikan sebagai sebuah jarak komunikasi yang terbentang jauh antara masyarakat (kaum *pariah*) dengan pemerintah (kelompok *parvenue*)

yang disebabkan tidak tersedianya ruang publik untuk melakukan dialog.

Program pembangunan kota seperti relokasi pemukiman, pengalih fungsi lahan menjadi menjadi gedung-gedung pencakar langit atau pusat industri dan pengusuran warung warung kopi pinggir jalan sebagai upaya untuk menciptakan kota yang indah, bersih dan modern. Tetapi sebenarnya hal-hal yang telah dilakukan tersebut menghilangkan akses masyarakat dalam mendapatkan ruang sosial dan ruang publiknya dalam berinteraksi sesama mereka.

Hilangnya akses masyarakat dalam mendapatkan ruang sosial dan ruang publik ini menurut Hannah Arendt merupakan upaya kaum *parvenue* dalam membungkam kaum pariah. Kaum *parvenue* yang menguasai wilayah (pemerintah) berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan cara meminimalisir kesempatan dari kaum marjinal (*pariah*) untuk berdiskusi dan menyuarakan opininya".

Menghilangkan ruang sosial dan ruang publik merupakan sebuah bentuk pembungkaman suara masyarakat. Demokrasi yang seharusnya menjamin hak dan kebebasan masyarakatnya di sayangkan telah berubah haluan menjadi sebuah kepentingan pribadi oleh mereka yang berkuasa. Demokrasi adalah sebuah ideologi yang menggambarkan semangat bersama dimana setiap keputusan diambil secara kolektif tetapi disisi lain dapat terjadi juga disinformasi. Hannah arendt menyebutkan masa disinformasi dengan "*drak time*" dimana pembicaraan mengenai publik oleh tokoh tokoh politik tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sesungguhnya sehingga ada upaya menyembunyikan keadaan sebenarnya (Koten 2019).

Keadaan masyarakat yang tidak di sampaikan dengan baik oleh tokoh politik semakin lama maka akan muncul sebuah bentuk pengaburan, dimana masyarakat

berada pada posisi tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh tokoh politiknya. Konsep pengaburan ini membuat masyarakat mewajarkan segala bentuk hal yang dilakukan oleh tokoh politik tanpa ada rasa keinginan menolak atau bersuara menyuatkan hak hak dan kepentingannya.

Menurut Arendt terdapat dua kategori aktor sosial yaitu pariah dan pervenu. Pariah adalah “*outsider*” yakni mereka yang tidak pernah masuk dalam sebuah ruang sosial, tidak pernah dilibatkan dalam lingkungan serta keberadaannya diabaikan. Di sisi lain, pervenu adalah mereka yang berupaya mencari kesempatan mendapatkan akses terhadap mobilitas kelas dalam ruang sosial (Nugroho 2009).

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivistik dengan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui metode wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan etnografi mikro, yang berfokus pada aspek ruang dalam interaksi komunikasi individu berlatarbelakang budaya kolektivistik. Etnografi pada level mikro ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian pada aspek tertentu dari suatu topik dan dalam waktu yang tidak terlalu panjang sebagaimana etnografi yang biasanya (Tobing 2021). Wawancara mendalam terhadap tiga narasumber dilakukan selama beberapa kesempatan di tahun 2017 hingga tahun 2018 pada dua lokasi penelitian, yaitu: Rusunawa Jatinegara Barat dan Kampung Pulo, keduanya berada di kelurahan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Sedangkan observasi telah dilakukan sejak awal proses relokasi hingga akhir tahun 2020. Setelah dilakukan wawancara (data primer) dilakukan proses triangulasi. Triangulasi dilakukan secara komprehensif selama tahun 2019 pada hasil wawancara dan hasil analisis, sehingga dapat ditentukan beberapa hal terkait topik yang merupakan diskusi menarik untuk dipaparkan dalam

karya publikasi ini. Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di rumah susun Jatinegara Barat merupakan masyarakat yang telah di relokasi dari hunian mereka sebelumnya yaitu di Kampung Pulo. Dari 1.021 KK yang terdampak relokasi di Kampung Pulo, sebanyak 518 KK (50%) direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat, sesuai dengan daya tampung yang telah disiapkan oleh pemerintah kota dan dinas perumahan rakyat. Beberapa warga sekitar Kampung Pulo yang ikut terdampak program normalisasi bantaran sungai Ciliwung tahap pertama ini juga ada yang direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat tersebut, meskipun demikian jumlahnya tidak lebih dari sepuluh persen

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Karakteristik budaya yang dimiliki masyarakat Kampung Pulo sebelum direlokasi adalah kolektivistik. Hal ini terbukti karena sebelum direlokasi mereka terlihat sering ngobrol bersama dengan sesamanya dan mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan individu, bahkan cenderung kepo. Pendatang yang baru tinggal di sana langsung dirangkul dan diajak dalam kegiatan kelompok mereka, sehingga dapat segera berbaur dan mengenal kebiasaan sehari-hari warga Kampung Pulo.

“Solidaritas, kekeluargaan, kebersamaan antar warga. Solidaritas kalo ada nikahan, ada acara apapun kita langsung tanpa komando masing-masing warga langsung menolong. Mungkin dari orang-orang terdahulu udah gitu, dari kakek saya, jadi budayanya gitu” (N-3).

“Kami bisa beradaptasi, lebih bisa bermain, dan lebih bebas daripada pendatang. Terutama dalam kegiatan bermasyarakat, apakah itu kegiatan gotong royong, kematian, perkawinan, keagamaan, sosial. Kami selalu ada kerja sama. Kalo

untuk pendatang ya mereka umumnya harus adaptasi dulu lah. Harus menjaga adab, sikap, ya mereka namanya pendatang. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar sampai terjalin komunikasi. Kami gak nyebut kamu pendatang, kita di Pulo itu persatuan, gotong royongnya bagus” (N-2)

Menurut narasumber, mereka sering berkomunikasi dan selalu berinteraksi karena ruang-ruang publik masih tersedia. Pada ruang-ruang terbuka yang ada di Kampung Pulo, mereka bisa saling bertukar informasi termasuk membicarakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dialog dan interaksi antarwarga tersebut mendorong kekompakan mereka, sehingga setiap informasi penting dengan mudah diketahui meskipun tanpa menggunakan media sosial dan internet.

Nilai nilai kohesivitas seperti gotong royong, tanpa kenal pamrih dan kompak menjadi karakteristik masyarakat pada saat itu. Tetapi setelah di relokasi masyarakat harus kembali beradaptasi, masyarakat yang awalnya kolektivistik berubah menjadi masyarakat yang individualistik dikarenakan perubahan prosekmi yang disebabkan oleh bentuk bangunannya itu sendiri.

“Pertama sih kita kurang bersosialisasi karena lahan kita tidak ada. Artinya, kalau di Kampung Pulo teras ke teras kita saling ngobrol bisa. Kan dekat Bu.. Kita duduk, ngobrol-ngobrol.. Di sini (rumah susun) ada rasa takut sama peraturan, yang tidak boleh adanya bangku di teras” (N-1)

“Di sini kita gak dapat.. Betul-betul kita tak dapat. Di sini bisa di lihat, gak ada orang keluar, gak ada depan rumah kursi-kursi panjang untuk ngobrol. Tiap lantai

kita lihat ya, rumahnya tertutup, mau ngobrol itu susah. Ngobrol susah, Kita gak mungkin ngetok-ngetok ke pintu sebelah” (N-2)

Hilangnya ruang publik yang menyebabkan masyarakat di rumah susun Jatinegara Barat kehilangan akses untuk menyampaikan inspirasinya, menyebabkan mereka layaknya tinggal di penjara tetapi dibungkus dengan hunian modern yang manusiawi. Padahal hal yang paling mereka butuhkan dalam lingkungan hunian tersebut adalah ruang-ruang publik untuk bersosialisasi dan untuk menyampaikan inspirasinya.

“Kalau di Pulo, untuk interaksi warga banyak tempatnya.. Mereka ga fokus di saung yang kita bangun aja.. mereka kumpul di halaman rumah, buka bersama, ngobrolngobrol atau sekedar ngopi ngopi bareng.. itu di sana aktifitasnya selalu seperti itu..” (N-1)

“Di lingkungan mushola ada tempat ngobrol.. di Pulo itu rumahnya rapat, orangnya baik gak pilih kasih, dengan siapa saja bisa ngobrol. Ada pemancingan, atau di teras rumah orang. Di pos, lapangan bulu tangkis, teras rumah orang, kita ngobrol dengan pemilik rumah pastinya” (N-2)

Selama tiga tahun (2016-2019) mereka berusaha beradaptasi pada ruang yang baru ini, dengan menyelaraskan persepsi mereka pada kebiasaan mereka di ruang-ruang yang sebelumnya di Kampung Pulo. Program relokasi ini secara tidak langsung menjadikan masyarakat yang tinggal di Rusunawa Jatinegara Barat menjadi kaum pariah yang termajinilkan sedangkan pemerintah menjadi kaum *parvernu*.

“Ya ngeliwet di depan rumah, panjang. Kalo di rusun kan gak bisa, karna kalo di Pulo udah puluhan tahun. Di sini baru 3 tahun.

Sudah seperti keluarga sendiri, patungan, saling menjenguk. Bersama-sama kondangan, kalo di sini gak bisa, susah” (N-2)

“Ngapain sih harus dilarang, kan ga mengganggu.. biasa di Kampung Pulo seperti itu, cobalah.. UPRS (pengelola rusunawa) nih, fleksibel dikit lah..” (N-1)

“Kalo di Pulo udah ketemu di luar rumah, jadi gak mesti di dalam rumah. Ya di luar ketemuannya, bukan di dalam rumah. Kalo di sini gak ada tempat ngobrol, paling di bawah, di foodcourt di bawah” (N-2)

Proses relokasi yang kemudian berhasil dilakukan memang membuat kota semakin indah, modern, dan lebih berfungsi dengan baik. Akan tetapi di sisi lain, warga relokasi yang ditempatkan pada hunian baru mendapati bahwa mereka tidak lagi memiliki pijakan yang kokoh, solidaritas yang mengakar sebagai pondasi kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya ruang publik bagi warga relokasi di hunian mereka yang baru.

Perlunya disiapkan ruang publik untuk masyarakat yang tinggal di Rusunawa sebagai akses utama mereka dalam menyampaikan inspirasinya dengan dialog dan kolaborasi menjadi kunci dan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun sewa Jatinegara Barat di tepi Kali Ciliwung tersebut. Dialog dan kolaborasi diharapkan akan menciptakan domakrasi yang pada akhirnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Asumsi dasar dari pemikiran Hannah Arendt yang merupakan suatu kritik terhadap modernitas adalah adanya rasa ketidakpercayaan/ keyakinan terhadap modernitas yang dinilai merusak dan

menghilangkan suara dari kaum marjinal (pariah). Arendt (1963) melihat bahwa modernitas merupakan “suatu eksperimen sosial yang terus berjalan tanpa arah, merusak tatanan masyarakat yang menentang ideologi dari modernitas”. Eksperimen yang berjalan tanpa arah dan merusak tatanan masyarakat sehingga menentang nilai nilai luhur yang ada di masyarakat dapat disebut imperialisme. Akibat yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut adalah runtuhnya konsep perbedaan antara ruang publik dan ruang privat. Oleh karena itu kita perlu menguatkan, memupuk dan membedakan konteks ruang publik dan ruang privat dalam hunian warga kampung kota.

Modernitas membunuh tradisi yang telah mengakar pada individu-individu yang memiliki keterikatan terhadap kelompok sosial budayanya. Dalam ranah sosialnya masyarakat yang telah dihilangkan ruang publik dan ruang privatnya secara terpaksa harus mengikuti ideologi modernitas bukan pada tradisi yang telah menjadi pondasi dalam hidupnya. Istilah *dark time* digunakan Hannah Arendt dalam menggambarkan keadaan sosial yang telah menghinai ruang publik dan ruang privat sehingga masyarakat harus menggunakan topeng untuk masuk dalam ranah sosial tersebut (Triyono, Agus. Kunto, Kurniawan. Mentari 2010). Penguatan komunikasi dalam ruang publik untuk kaum pariah merupakan suatu ide dan aksi agar memungkinkan terciptanya kolaborasi antara kaum pariah dan parvenu. Masyarakat yang tinggal di rumah susun sewa jatinegara adalah meraka yang telah di relokasi dari pemukiman meraka di tepi kali ciliwung. Masyarakat berbudaya kolektivistik berubah ketika di relokasi menjadi budaya individual, interaksi semakin sulit karena bentuk bangunan yang vertikal atas paksaan tersebutlah masyarakat yang tinggal tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan dan tempat tinggal serta pengaburan budaya terus terjadi hari demi hari.

Proses relokasi yang kemudian berhasil dilakukan memang membuat kota semakin indah, modern, dan lebih berfungsi dengan baik. Akan tetapi di sisi lain, warga relokasi yang ditempatkan pada hunian baru mendapati bahwa mereka tidak lagi memiliki pijakan yang kokoh, solidaritas yang mengakar sebagai pondasi kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya ruang publik bagi warga relokasi di hunian mereka yang baru.

Perlunya disiapkan ruang publik untuk masyarakat yang tinggal di Rusunawa sebagai akses utama mereka dalam menyampaikan inspirasinya dengan dialog dan kolaborasi menjadi kunci dan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun sewa Jatinegara Barat di tepi Kali Ciliwung tersebut. Dialog dan kolaborasi diharapkan akan menciptakan domakrasi yang pada akhirnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Asumsi dasar dari pemikiran Hannah Arendt yang merupakan suatu kritik terhadap modernitas adalah adanya rasa ketidakpercayaan/ keyakinan terhadap modernitas yang dinilai merusak dan menghilangkan suara dari kaum marjinal (pariah). Arendt (1963) melihat bahwa modernitas merupakan “suatu eksperimen sosial yang terus berjalan tanpa arah, merusak tatanan masyarakat yang menentang ideologi dari modernitas”. Eksperimen yang berjalan tanpa arah dan merusak tatanan masyarakat sehingga menentang nilai nilai luhur yang ada di masyarakat dapat disebut imperialisme. Akibat yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut adalah runtuhnya konsep pembedaan antara ruang publik dan ruang privat. Oleh karena itu kita perlu menguatkan, memupuk dan membedakan konteks ruang publik dan ruang privat dalam hunian warga kampung kota.

Modernitas membunuh tradisi yang telah mengakar pada individu-individu yang memiliki keterikatan terhadap kelompok

sosial budayanya. Dalam ranah sosialnya masyarakat yang telah dihilangkan ruang publik dan ruang privatnya secara terpaksa harus mengikuti ideologi modernitas bukan pada tradisi yang telah menjadi pondasi dalam hidupnya. Istilah dark time digunakan Hannah Arendt dalam menggambarkan keadaan sosial yang telah menghinai ruang publik dan ruang privat sehingga masyarakat harus menggunakan topeng untuk masuk dalam ranah sosial tersebut (Triyono, Agus. Kunto, Kurniawan. Mentari 2010). Penguatan komunikasi dalam ruang publik untuk kaum pariah merupakan suatu ide dan aksi agar memungkinkan terciptanya kolaborasi antara kaum pariah dan parvenu. Masyarakat yang tinggal di rumah susun sewa jatinegara adalah meraka yang telah di relokasi dari pemukiman meraka di tepi kali ciliwung. Masyarakat berbudaya kolektivistik berubah ketika di relokasi menjadi budaya individual, interaksi semakin sulit karena bentuk bangunan yang vertikal atas paksaan tersebutlah masyarakat yang tinggal tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan dan tempat tinggal serta pengaburan budaya terus terjadi hari demi hari.

#### **IV. Kesimpulan**

Hilangnya ruang publik di rumah susun Jatinegara Barat disebabkan oleh relokasi paksa oleh pemerintah dengan tujuan mencapai kota yang bersih dan indah serta modern. Perlunya ruang publik sebagai tempat menyampaikan aspirasi harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Penguatan komunikasi melalui dialog dan kolaborasi antara pemerintah (parvenue) dan masyarakat (pariah) yang tinggal di rumah susun tersebut akan menghasilkan demokrasi. Demokrasi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Dengan hadirnya pemerintah dalam kolaborasinya dengan masyarakat yang tinggal di rumah susun diharapkan akan membuat masyarakat di daerah tersebut kembali mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Masyarakat

kolektivistik yang sekarang tinggal di hunian bersifat individualistik akan tetap berupaya beradaptasi tanpa kehilangan jatidirinya sebagai masyarakat yang kolektivistik karena pemerintah akan menjembatani hal tersebut dengan ketersediaan ruang-ruang publik mereka.

Penyediaan ruang publik oleh pemerintah harus terus disuarakan. Masyarakat yang tinggal di rumah susun sudah semestinya mendapatkan hak-haknya untuk menyampaikan aspirasinya.

Konsep perencanaan hunian yang menghilangkan ruang publik dengan dibungkus menggunakan kata modernitas bukan merupakan hal yang tepat untuk diberlakukan diberlakukan bagi masyarakat Kampung Pulo, maupun masyarakat kampung kota lainnya yang memiliki karakteristik budaya kolektivistik. Hal yang juga penting dalam menjaga kesinambungan demokrasi antara kaum pariah dan parvenu tersebut, bisa disimpulkan dapat difasilitasi oleh penyediaan ruang-ruang publik sebagai tempat kaum pariah melakukan interaksi sosial mereka. Penyediaan hunian bagi warga relokasi kampung kota itu sedianya memerlukan ruang-ruang publik untuk berjalannya demokrasi di negara ini. Dengan adanya demokrasi maka kolaborasi antara masyarakat yang tinggal di rumah susun tersebut dan pemerintah akan menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

#### **Daftar Pustaka**

Budiharjo, Eko. 1992. *A Number Of Urban Settlement Problems*. Bandung: Alumni.

Danesi, M & Perron, P. 1999. *Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

Hall, Edward T. 1964. *The System of Proxemic Natation, Iilionois*. USA: Illinois Institute of Techonology.

Heryati. 2011. "Kampung Kota Sebagai Bagian Dari Permukiman Kota Studi Kasus : Tipologi Permukiman Rw 01 Rt 02 Kelurahan Limba B Dan Rw 04 Rt 04 Kel. Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo." *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo* 11–13.

Koten, Yosef Keladu. 2019. "Konsep Hannah Arendt Tentang Politik Sebagai Pembicaraan Dan Kontribusinya Dalam Menyikapi Pluralitas Pandangan." *Jurnal Ledalero* 18(1):123. doi: 10.31385/jl.v18i1.163.123-148.

Nugroho, Alois. 2009. "Menggali Warisan Hannah Arendt Dalam 'Asal-Usul Totalitarisme.'" 14(1):7–21.

Tobing, Melati Mediana. 2017. "Jurgen Habermas Dan Ruang Publik Di IndonesiaJurgen Habermas Dan Ruang Publik Di Indonesia"." *Jurnal FISIP Universitas Kristen Indonesia* 1–32.

Tobing, Melati Mediana. 2021. *Proxemic Contradiction in Urban Kampong Collectivistic Society (Review of Intercultural Communication in the Vertical House Spaces by Relocated Residents of Kampung Pulo Ciliwung Riverside)*. Depok: Universitas Indonesia.

Tobing, Melati Mediana, Ilya Revianti Sunarwinadi, and Endah Triastuti. n.d. "PROXEMIC CONTRADICTIONS OF THE RELOCATED KAMPUNG PULO RESIDENTS: FROM CILIWUNG

RIVERBANKS TO THE VERTICAL HOUSE.” 1–13.

Triyono, Agus. Kunto, Kurniawan. Mentari, Dini. and Rajiem. 2010. “Tugas Presentasi Filsafat Komunikasi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2010.” 1–11.

Tunner, J. .. 1985. *Housing by People*. New York: MIT Press.